

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu keberlanjutan pada beberapa tahun terakhir semakin menempati posisi penting dalam perhatian para pemangku kepentingan di tingkat global, seperti investor, regulator, dan publik. Dorongan tersebut muncul seiring dengan meningkatnya dampak perubahan iklim, keterbatasan sumber daya alam, serta tekanan institusional, yang mendorong perusahaan untuk menyesuaikan aktivitas dan kebijakan mereka dengan ekspektasi masyarakat (Pinheiro & dos Santos, 2025). Pada situasi tersebut, pelaporan keberlanjutan berperan dalam memperkuat keterikatan merek perusahaan, membentuk penilaian positif dari masyarakat, membangun persepsi positif di mata para pemangku kepentingan, serta meningkatkan citra dan reputasi perusahaan (Sneideriene & Legenzova, 2025). Hal ini membuat perusahaan berada di bawah dorongan berkelanjutan dari para pemangku kepentingan untuk memperkuat dan memperbaiki kebijakan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan (Zahid et al., 2023). Kondisi tersebut membuka kesempatan bagi perusahaan untuk memperoleh kepercayaan dan penghargaan dari pelanggan maupun pemangku kepentingan melalui penyampaian informasi yang lebih akurat dan berbasis fakta. Namun, perhatian yang besar terhadap citra, reputasi, serta legitimasi organisasi juga dapat mendorong perusahaan untuk membesar-besarkan klaim atau bahkan menyampaikan informasi yang tidak akurat guna memengaruhi persepsi para

pemangku kepentingan (Ma & Ahmad, 2024). Perbedaan pendekatan dan sasaran yang terdapat dalam berbagai standar serta kerangka kerja keberlanjutan berpotensi meningkatkan risiko terjadinya praktik *greenwashing* (Lokuwaduge & De Silva, 2022).

Konsep *greenwashing* diperkenalkan oleh aktivis lingkungan Jay Westerveld pada tahun 1986 untuk menggambarkan praktik perusahaan dalam aktivitas promosi, di mana informasi yang dipublikasikan membentuk citra ramah lingkungan yang diharapkan, namun tidak selaras dengan kondisi nyata suatu entitas atau produk keuangan. Hal ini dilakukan secara sengaja maupun tanpa tidak sengaja (Lagasio, 2024). *Greenwashing* mengancam akurasi dan keandalan pelaporan keberlanjutan dan memengaruhi kualitas pengungkapan serta kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap informasi yang diungkapkan (Sneideriene & Legenzova, 2025).

Tingkat *greenwashing* dapat diidentifikasi melalui sejumlah indikator, antara lain dengan menilai selisih antara informasi yang diungkapkan perusahaan dan kinerja yang dicapai, serta melalui pendekatan analisis konten berbasis teknologi. Pendekatan kesenjangan antara pengungkapan dan kinerja dilakukan dengan membandingkan skor pengungkapan yang diperoleh dari basis data seperti Bloomberg dengan penilaian kinerja ESG aktual yang bersumber dari Refinitiv Eikon atau Huazheng ESG. Nilai *greenwashing* yang positif mengindikasikan bahwa perusahaan menyajikan pelaporan *Environmental, Social, dan Governance* (ESG) yang relatif tinggi dibandingkan perusahaan lain, namun tidak diimbangi dengan kinerja lingkungan yang memadai. Kondisi ini mencerminkan

kecenderungan perusahaan untuk menyamarkan kinerja yang lemah melalui penyajian informasi simbolis yang tidak merepresentasikan praktik keberlanjutan secara nyata. Pendekatan tersebut banyak digunakan dalam penelitian karena mampu menangkap perilaku perusahaan yang membangun citra ramah lingkungan tanpa didukung oleh tindakan keberlanjutan yang substantif (Fathoni, Hanafi, et al., 2025; Fathoni, Hanafi, Mamduh, et al., 2025; Liu, 2024; Ma & Ahmad, 2024; Zhang, 2022).

Pengukuran *greenwashing* dengan pendekatan analisis konten berbasis teknologi ini menggunakan analisis teks dan kecerdasan buatan seperti *Natural Language Processing* (NLP). Pendekatan ini mengidentifikasi indikasi *greenwashing* dengan menelaah pola bahasa yang terlalu bernuansa positif, penggunaan diksi yang bersifat persuasif atau manipulatif, serta pengulangan pernyataan yang tidak disertai data pendukung yang memadai. Salah satu metode yang digunakan adalah Indeks Tingkat Keparahan *ESG-Washing* (*ESG-Washing Severity Index/ ESGSI*), yang menilai keberadaan *greenwashing* melalui perhitungan selisih antara skor sentimen positif dan skor bobot konten faktual. Ketika tingkat sentimen positif jauh melampaui kekuatan data yang disajikan, perusahaan tersebut diindikasikan melakukan praktik *greenwashing*. Selain itu, teknik NLP juga digunakan untuk menilai aspek keterbacaan dan panjang laporan. Perusahaan yang terlibat dalam *greenwashing* cenderung menghasilkan laporan yang lebih panjang dengan nada sangat optimistis, namun disusun menggunakan struktur bahasa yang kompleks dan kurang mudah dipahami, sehingga dapat

menyamarkan kinerja lingkungan yang sebenarnya rendah (Gorovaia & Makrominas, 2024; Lagasio, 2024).

Penelitian ini mengukur *greenwashing* menggunakan pendekatan analisis konten berbasis teknologi analisis teks dan kecerdasan buatan, yaitu *Natural Language Processing* (NLP). Pendekatan ini tepat karena praktik *greenwashing* umumnya tidak muncul akibat adanya upaya lingkungan, melainkan melalui penggunaan komunikasi yang bersifat simbolik secara berlebihan dan selektif dalam penyajian laporan tahunan perusahaan. Keunggulan utama penggunaan NLP dalam pengukuran *greenwashing* terletak pada kemampuannya meminimalkan subjektivitas yang biasanya muncul dalam analisis konten manual, sekaligus meningkatkan konsistensi dan kemudahan replikasi hasil penelitian. Selain itu, NLP memungkinkan pengolahan data teks dalam skala besar, baik lintas perusahaan maupun antarperiode waktu, sehingga sesuai diterapkan dalam penelitian data panel. Pendekatan ini juga efektif dalam mengidentifikasi nuansa bahasa serta pola komunikasi strategis yang kerap dimanfaatkan perusahaan untuk menampilkan aktivitas lingkungan secara lebih positif dibandingkan kondisi yang sebenarnya (Gorovaia & Makrominas, 2024).

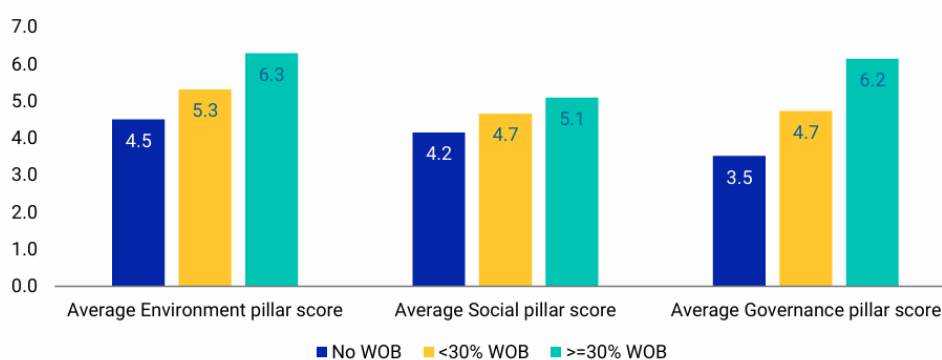
Praktik *greenwashing* muncul akibat keterkaitan berbagai hubungan yang saling memengaruhi. Keterlibatan perusahaan dalam praktik tersebut dipicu oleh berbagai faktor yang secara umum dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu faktor eksternal, faktor organisasi, dan faktor individu (Sneideriene & Legenzova, 2025). Pada perusahaan, pengambilan keputusan dalam menetapkan tolok ukur transparansi serta integritas yang tinggi sekaligus memastikan bahwa

operasional perusahaan dijalankan dengan komitmen keberlanjutan yang autentik dilakukan oleh Dewan Komisaris. Tanggung jawab tersebut mencakup pembentukan mekanisme yang jelas dalam mengelola berbagai klaim lingkungan, baik yang diungkapkan secara tersirat maupun tidak, dalam komunikasi perusahaan kepada pihak eksternal (Jamil & Wahyuni, 2025). Sehingga karakteristik Dewan Komisaris (*Board characteristics*) turut andil dalam adanya praktik *greenwashing* pada suatu perusahaan (Ghitti et al., 2024; Jamil & Wahyuni, 2025; Ma & Ahmad, 2024; Pinheiro & dos Santos, 2025; Poiriazi et al., 2025).

Board characteristics memainkan peran penting dalam memengaruhi strategi lingkungan perusahaan dan kemungkinan terlibat dalam praktik *greenwashing*. Akibatnya, peran *board characteristics* menjadi krusial dalam upaya menekan praktik *greenwashing*, terutama dengan memastikan bahwa setiap inisiatif keberlanjutan yang dijalankan perusahaan dilandasi komitmen yang nyata serta disampaikan secara terbuka dan jujur. *Board characteristics* terdiri dari keragaman gender (*board gender diversity*), keahlian (*board expertise*), independensi (*board independence*), dan ukuran dewan komisaris (*board size*) (Jamil & Wahyuni, 2025; Ma & Ahmad, 2024; Poiriazi et al., 2025).

Pendekatan *board gender diversity* dalam struktur dewan direksi dipandang sebagai salah satu upaya strategis untuk memperkuat tata kelola perusahaan. Tata kelola yang solid berperan penting dalam menekan berbagai bentuk perilaku tidak etis, termasuk praktik *greenwashing* dalam kerangka ESG. Keterlibatan perempuan di jajaran direksi menghadirkan perspektif yang beragam serta

kecenderungan pengambilan keputusan yang lebih kolaboratif, sehingga memengaruhi proses pengambilan keputusan yang lebih objektif, seimbang, dan berfokus pada keberlanjutan dan tujuan perusahaan untuk masa mendatang (Fathoni, Hanafi, et al., 2025). Berdasarkan data dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) ESG Research LLC tahun 2022 (Matanda et al., 2022), terdapat peningkatan 20% jumlah perempuan yang menduduki posisi dewan direksi. Survei Deloitte (2024) menunjukkan adanya peningkatan yang cukup pesat dalam keterwakilan perempuan pada jajaran dewan direksi dengan pertumbuhan sebesar 3,6 poin presentase dibandingkan 2022. Sejalan dengan temuan tersebut, visualisasi data dari MSCI memperlihatkan bahwa perusahaan dengan komposisi perempuan lebih banyak di tingkat dewan komisaris berpotensi mencatat capaian kinerja yang lebih unggul pada seluruh pilar ESG.



Sumber: MSCI ESG Research

Gambar 1 Kinerja ESG Perusahaan dengan Tingkat Board Gender Diversity

Pada gambar 1 mengilustrasikan bahwa keberadaan dewan komisaris perempuan cenderung mendorong perhatian yang lebih besar terhadap isu sosial berjangka panjang, terutama yang berkaitan dengan perubahan iklim. Tingkat *board gender diversity* yang lebih tinggi di dalam dewan komisaris juga

memperkaya sudut pandang yang dipertimbangkan dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan. sehingga berpotensi meningkatkan kreativitas serta kualitas keputusan yang dihasilkan. Kondisi tersebut berpotensi mendorong tingkat kreativitas yang lebih tinggi serta menghasilkan keputusan yang lebih berkualitas.

Terdapat penelitian menyatakan bahwa *board gender diversity* berpengaruh positif dengan praktik *greenwashing*. Penelitian ini menunjukkan jumlah dewan komisaris perempuan yang lebih tinggi dalam dewan direksi dikaitkan dengan kinerja keberlanjutan yang lebih rendah karena kesibukan ekstrem perempuan dengan penunjukan dewan direksi (Ghitti et al., 2024). Namun, sebagian besar penelitian terdahulu menjelaskan bahwa *board gender diversity* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *greenwashing*. Hal ini artinya semakin tinggi tingkat keberagaman *gender* di Dewan Komisaris, semakin rendah kecenderungan untuk melakukan *greenwashing* (Castilo et al., 2025; Cotugno et al., 2025; Fathoni, Hanafi, et al., 2025; Fathoni, Hanafi, Mamduh, et al., 2025; Jamil & Wahyuni, 2025; Lee et al., 2025; Liu, 2024; Ma & Ahmad, 2024; Zahid et al., 2023).

Struktur dewan komisaris yang mencerminkan keberagaman latar belakang dan keahlian profesional (*board expertise*) berperan dalam memperkuat sistem pengendalian internal perusahaan. Pengendalian internal yang lebih efektif tersebut dapat menekan permasalahan dalam pelaporan keberlanjutan serta meningkatkan keterbukaan dalam pengungkapan informasi lingkungan. Selain itu, keberadaan komisaris yang memiliki kapabilitas tinggi terutama di bidang

akuntansi dan keuangan memicu perusahaan untuk melaksanakan inisiatif keberlanjutan yang bersifat substantif dan berdampak nyata, bukan sekadar tindakan simbolis (Jamil & Wahyuni, 2025).

Latar belakang pendidikan dipandang sebagai salah satu determinan utama dalam membentuk kualitas dan arah praktik komitmen keberlanjutan perusahaan. Dewan komisaris dengan karakteristik pendidikan yang baik cenderung mendorong penerapan strategi yang berorientasi pada keberlanjutan dan peningkatan kualitas pelaksanaan keberlanjutan perusahaan (Chen & Dagestani, 2023). Menurut PricewaterhouseCoopers (PwC) (2022), 52% anggota dewan menyatakan bahwa isu ESG menjadi agenda pembahasan rutin. Kurangnya keahlian di tingkat dewan komisaris (*board expertise*) berisiko menyebabkan *oversight* yang bersifat simbolik, di mana dewan komisaris hanya menyetujui laporan keberlanjutan tanpa evaluasi substansi. Temuan ini didukung oleh Jamil & Wahyuni (2025) yang menyatakan bahwa tingkat *board expertise* yang tinggi, maka menurunkan kemungkinan perusahaan berpartisipasi dalam *greenwashing*. Dengan demikian, *board expertise* berpengaruh negatif dan signifikan dengan *greenwashing*.

Pengungkapan keberlanjutan yang menyesatkan atau *greenwashing* juga dapat diminimalisir dengan jumlah dewan komisaris independen (*board independence*) (Jamil & Wahyuni, 2025). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik (2014), setiap emiten atau perseroan diwajibkan memiliki Komisaris Independen dengan proporsi paling sedikit 30% dari jumlah

keseluruhan anggota Dewan Komisaris. Ketentuan ini ditetapkan untuk memperkuat peran pengawasan serta mengurangi risiko terjadinya perbedaan orientasi kepentingan antara pihak manajemen dan pemegang saham. Penguatan unsur independensi dalam struktur dewan menjadi semakin penting karena Dewan Komisaris memegang peran strategis dalam mengawasi arah kebijakan manajemen, memastikan perusahaan menjalankan aktivitas sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan memberikan masukan kepada Dewan Direksi, termasuk terkait transparansi dan akuntabilitas penyusunan laporan tahunan. Sejalan dengan itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik (2014), menegaskan bahwa independensi dewan komisaris (*board independence*) bukan sekadar penerapan tata kelola secara sukarela, melainkan merupakan kewajiban yang diatur secara formal, dengan tujuan meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan, menekan kecenderungan perilaku oportunistik manajemen, dan pada akhirnya memperkuat kredibilitas tata kelola perusahaan publik di Indonesia.

Temuan empiris terkait *board independence* terhadap *greenwashing* masih menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian Pinheiro & dos Santos (2025) serta Ghitti et al. (2024) yang menjelaskan bahwa *board independence* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *greenwashing*. Kondisi ini dapat dijelaskan oleh kecenderungan anggota *board independence* yang berorientasi pada pencapaian hasil jangka pendek dan upaya menarik perhatian investor, sehingga berpotensi menyetujui kebijakan yang menampilkan citra perusahaan seolah-olah lebih berkelanjutan dibandingkan praktik yang sebenarnya. Sebaliknya, penelitian

Jamil & Wahyuni (2025), Lee et al. (2025), serta Ma & Ahmad (2024) menunjukkan bahwa *board independence* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *greenwashing*. Semakin tinggi proporsi *board independence*, semakin negatif pengaruhnya terhadap *greenwashing*. Kondisi tersebut mengindikasikan keterkaitan antara tingkat *board independence* dan kecenderungan terjadinya *greenwashing*, di mana lemahnya fungsi pengawasan oleh komisaris eksternal dapat membuka peluang bagi perusahaan untuk menerapkan praktik *greenwashing* (Jamil & Wahyuni, 2025).

Keberagaman perspektif dan keahlian dalam diskusi mengenai isu keberlanjutan juga disebabkan oleh ukuran dewan komisaris (*board size*) yang memengaruhi efektivitas tata kelola perusahaan. Dewan komisaris dengan volume anggota yang lebih banyak umumnya memiliki kapasitas pemahaman keilmuan yang beragam dan sudut pandang yang lebih luas, sehingga dapat memperkaya kualitas keputusan dalam perumusan kebijakan lingkungan perusahaan (Jamil & Wahyuni, 2025). Komposisi volume anggota dewan komisaris yang proporsional dapat meningkatkan efektivitas dari fungsi pengawasan dan mengurangi dominasi pengaruh individu tertentu dalam proses pengambilan keputusan dewan komisaris (Ghitti et al., 2024).

Sejumlah kajian yang menyatakan bahwa *board size* tidak berpengaruh terhadap *greenwashing* (Lee et al., 2025; Pinheiro & dos Santos, 2025). Namun, terdapat penelitian lain menemukan bahwa *board size* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *greenwashing*. Tingkat *board size* yang tinggi berpotensi menekan praktik *greenwashing* karena keberagaman pengetahuan yang dimiliki

serta pengawasan yang lebih kuat terhadap kinerja lingkungan perusahaan (Jamil & Wahyuni, 2025; Poiriazi et al., 2025).

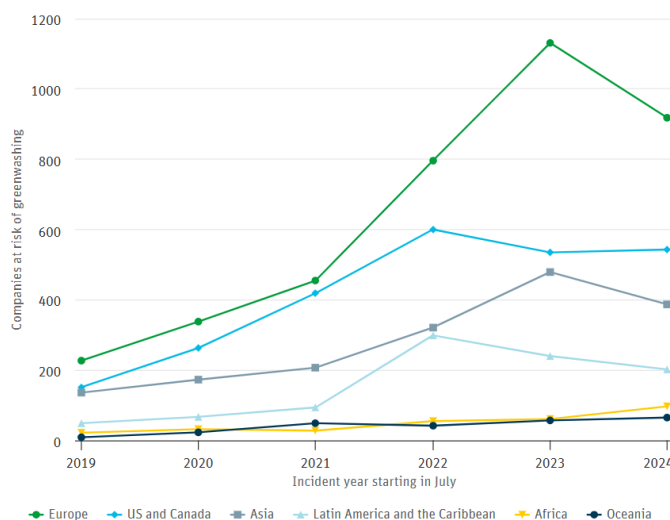
Perusahaan di berbagai negara banyak yang memiliki koneksi politik (*political connection*). Koneksi tersebut diketahui memengaruhi perilaku korporasi dan secara luas dianggap memberikan sejumlah manfaat bagi perusahaan yang terhubung secara politik (Liu et al., 2025). Dewan komisaris memanfaatkan relasi politik guna melemahkan tekanan regulasi dari pemerintah, serta menggunakan jaringan hubungan pribadi di tingkat lokal untuk melonggarkan pengawasan dan ketentuan pasar. Keberadaan koneksi politik tersebut berpotensi mendorong penempatan kepentingan pribadi atau agenda politik di atas tujuan jangka panjang perusahaan. Pada kondisi demikian, perusahaan dapat terdorong melakukan *greenwashing* sebagai sarana memperoleh dukungan politik yang menguntungkan secara personal. Ketidakseimbangan kepentingan ini membuka ruang bagi munculnya perilaku yang tidak etis melalui pemanfaatan relasi politik. Bukti empiris juga menunjukkan bahwa perusahaan yang dewan komisarisnya memiliki kedekatan dengan pihak politik sering dipersepsikan lebih kecil kemungkinannya untuk dikenai sanksi atas pelanggaran. Situasi tersebut pada akhirnya meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk terlibat dalam praktik *greenwashing* (Chen et al., 2025).

Studi penelitian mengatakan bahwa *political connection* berpengaruh negatif dan signifikan dengan *greenwashing* (Chen et al., 2025). Namun, terdapat pula penelitian yang memberikan pernyataan bahwa *political connection* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *greenwashing*. Perusahaan dengan *political*

connection menunjukkan tingkat *greenwashing* yang melebihi perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki karakteristik *political connection* (Liu et al., 2025).

Selain kewajiban yang ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.02/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik (2017), yang mengharuskan Lembaga Jasa Keuangan, emiten, dan perusahaan publik di Indonesia menyusun serta menerbitkan laporan keberlanjutan setiap tahun bersama laporan tahunan, perusahaan juga didorong oleh berbagai pertimbangan internal untuk menerapkan prinsip ESG dalam kegiatan operasional serta kebijakan strategis perusahaan. Berdasarkan hasil survei Mandiri Institute (2022), dengan responden sebanyak 190 perusahaan yang masuk dalam daftar di Bursa Efek Indonesia, terdapat 40% yang menjawab bahwa melakukan implementasi ESG untuk mengikuti arahan para *stakeholder*. Kemudian tantangan tertinggi yang dihadapi perusahaan adalah kesulitan dalam menetapkan kriteria, pengukuran, dan indikator kinerja terkait ESG. Kurangnya pemahaman mengenai ESG ini mampu menimbulkan risiko *greenwashing*.

Berdasarkan dari data RepRisk (2024), benua Asia di tahun 2022 dan tahun 2023 mengalami peningkatan yang pesat dalam praktik *greenwashing*. Kemudian, pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, praktik *greenwashing* pada 2024 tidak lebih rendah dari 2022.



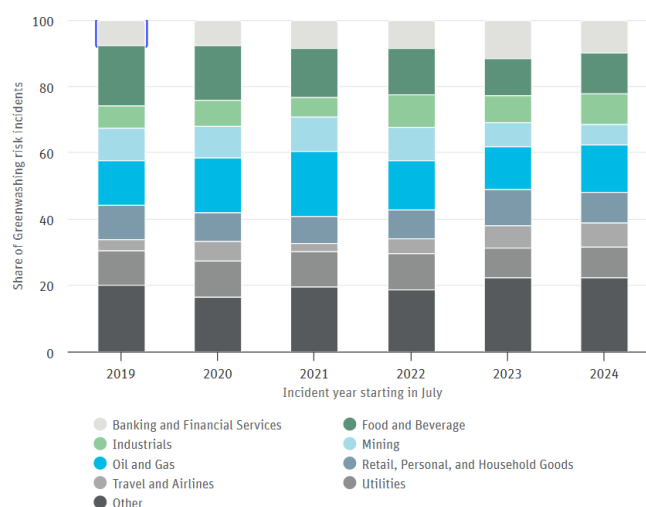
Sumber: RepRisk Media (2024)

Gambar 2 Tingkat Greenwashing di Sebagian Besar Wilayah

Tingkat kepedulian terhadap isu lingkungan menunjukkan variasi yang jelas antara kawasan negara maju atau negara industri dan negara berkembang. Pada negara maju atau negara industri, kesadaran lingkungan masyarakat relatif tinggi, namun regulasi yang secara khusus mengatur dan menindak praktik *greenwashing* masih terbatas baik dari sisi cakupan maupun tingkat penegakannya, seperti yang terlihat pada konteks Amerika Serikat. Kelemahan regulasi tersebut justru berkontribusi pada semakin kompleksnya persoalan *greenwashing*, yang dampaknya cenderung lebih serius dan sulit dikendalikan di negara berkembang (Ma & Ahmad, 2024).

Berdasarkan laporan RepRisk (2024) yang dilakukan secara global dan mencakup perusahaan di berbagai benua, perusahaan sektor energi, khususnya industri minyak dan gas, tercatat sebagai sektor dengan tingkat praktik *greenwashing* tertinggi dibandingkan sektor industri lainnya. Pada tahun 2022 hingga 2024, sektor energi ini mengalami tren yang bervariasi. Di tahun 2022,

kasus *greenwashing* pada sektor ini sebanyak 191 yang merepresentasikan 15% dari sembilan sektor perusahaan. Kemudian, tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 225 praktik *greenwashing*. Namun, persentasenya menurun menjadi 13%. Selanjutnya, di tahun 2024 praktik *greenwashing* menurun dari tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 211 dan merepresentasikan sebesar 14%.



Sumber: RepRisk Media (2024)

Gambar 3 Pergeseran Pengelompokan Sektor terkait Praktik *Greenwashing*.

Temuan global tersebut menunjukkan menunjukkan bahwa praktik *greenwashing* pada sektor energi bukan hanya fenomena lintas negara, tetapi juga berpotensi kuat terjadi di negara dengan kontribusi emisi karbon yang signifikan, seperti Indonesia. Berdasarkan dari data Worldometer (2022), Indonesia berada pada posisi keenam sebagai penyumbang emisi karbon terbesar di dunia dengan jumlah emisi sekitar 692 juta ton CO₂ pada tahun 2022, yang merepresentasikan sekitar 1,8% dari total emisi global. Tingginya kontribusi emisi tersebut menunjukkan bahwa sektor energi di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai permasalahan lingkungan, seperti emisi karbon yang tinggi, pencemaran

lingkungan, serta konflik pemanfaatan sumber daya alam. Namun demikian, di tengah besarnya dampak lingkungan yang dihasilkan, banyak perusahaan sektor energi secara aktif menampilkan narasi ramah lingkungan melalui laporan keberlanjutan dan publikasi korporasi. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi praktik *greenwashing*, di mana pengungkapan lingkungan lebih berperan dalam alat legitimasi untuk mempertahankan citra perusahaan di mata publik dan pemangku kepentingan, daripada sebagai cerminan kinerja lingkungan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, fenomena ini menegaskan pentingnya penelitian mengenai *greenwashing* yang difokuskan pada perusahaan sektor energi di Indonesia.

Meskipun secara empiris perusahaan sektor energi di Indonesia menunjukkan tingkat emisi karbon yang tinggi serta meningkatnya perhatian terhadap potensi praktik *greenwashing*, pembahasan penelitian yang secara khusus mengkaji determinan *greenwashing* dalam konteks perusahaan sektor energi di negara berkembang masih relatif terbatas. Kondisi ini mengindikasikan adanya *empirical gap*, khususnya dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, yang memiliki karakteristik tata kelola dan lingkungan institusional yang berbeda dengan negara maju. Selain itu, belum ada penelitian yang menganalisis *board characteristics* dan *political connection* terhadap *greenwashing* secara bersamaan. Kemudian, penggunaan pengukuran NLP pada penelitian ini memberikan keunggulan empiris karena memungkinkan analisis teks laporan keberlanjutan secara objektif, konsisten, dan dalam skala besar, sehingga lebih efektif dalam

mengidentifikasi pola greenwashing yang tersembunyi dalam pengungkapan naratif perusahaan.

Pemilihan periode penelitian 2022 hingga 2024 didasarkan pada pertimbangan empiris dan regulatif, karena periode ini mencerminkan fase krusial pascapandemi COVID-19 yang ditandai dengan meningkatnya penerapan prinsip ESG, kepatuhan pelaporan keberlanjutan khususnya pascapemberlakuan POJK Nomor 51/POJK.03/2017, serta sorotan terhadap potensi praktik greenwashing pada perusahaan sektor energi. Oleh karena itu, penelitian pada periode tersebut dipandang relevan untuk mengkaji determinan *greenwashing* secara empiris.

Uraian latar belakang serta fenomena yang telah dijelaskan di atas, menjadi landasan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Board Characteristics* dan *Political Connection* Terhadap *Greenwashing* Pada Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2022-2024”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *Board Gender Diversity* berpengaruh terhadap *Greenwashing* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI pada tahun 2022-2024?
2. Apakah *Board Expertise* berpengaruh terhadap *Greenwashing* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI pada tahun 2022-2024?
3. Apakah *Board Independence* berpengaruh terhadap *Greenwashing* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI pada tahun 2022-2024?

4. Apakah *Board Size* berpengaruh terhadap *Greenwashing* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI pada tahun 2022-2024?
5. Apakah *Political Connection* berpengaruh terhadap *Greenwashing* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI pada tahun 2022-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh *Board Gender Diversity* terhadap *Greenwashing* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI pada tahun 2022-2024.
2. Untuk menganalisis pengaruh *Board Expertise* terhadap *Greenwashing* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI pada tahun 2022-2024.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Board Independence* terhadap *Greenwashing* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI pada tahun 2022-2024.
4. Untuk menganalisis pengaruh *Board Size* terhadap *Greenwashing* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI pada tahun 2022-2024.
5. Untuk menganalisis pengaruh *Political Connection* terhadap *Greenwashing* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI pada tahun 2022-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Secara Teoritis

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan kontribusi akademik dengan mengisi keterbatasan literatur empiris mengenai pengaruh *board characteristics* dan *political connection* terhadap *greenwashing* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI pada tahun 2022-2024.

2) Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan kesempatan untuk memperdalam pemahaman mengenai pengaruh *board characteristics* dan *political connection* terhadap *greenwashing* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI pada tahun 2022-2024.

b. Bagi Investor

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat membantu investor menilai risiko reputasi terkait *greenwashing* serta memperjelas indikator pengawasan. Sehingga investor dapat mengambil keputusan investasi yang tepat.

c. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu menekankan pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang efektif melalui penguatan karakteristik dewan, termasuk keberagaman gender, dan

keahlian dewan. Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan kesadaran manajemen dan pemegang saham bahwa komposisi dewan yang tepat berperan dalam meningkatkan kredibilitas pengungkapan keberlanjutan serta menekan kecenderungan praktik *greenwashing*.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dan regulator, khususnya dalam merumuskan serta mengevaluasi kebijakan tata kelola perusahaan dan pelaporan keberlanjutan untuk meminimalkan praktik *greenwashing*.